



Judul : Jokowi Tolak Bertemu Panitia Angket
Tanggal : Jumat, 22 September 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 10

Jokowi Tolak Bertemu Panitia Angket

Presiden Joko Widodo memberi sinyal bakal menolak bertemu dengan Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut dia, penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK bukan domain eksekutif.

"Itu wilayahnya DPR, kasusnya di sana," kata Jokowi di sela Indonesia Business and Development Expo 2017, Rabu lalu.

Menurut Jokowi, semua pihak harus tahu wewenang masing-masing. Jika suatu hal merupakan wewenang legislatif, kata dia, presiden tak perlu terlibat.

Rencana Panitia Angket bertemu dengan Jokowi dilontarkan Masinton Pasaribu—Wakil Ketua Panitia Angket KPK yang belakangan dicopot oleh Fraksi PDI Perjuangan—pada Senin lalu. Menurut Masinton, Panitia ingin menyampaikan hasil kerjanya kepada Jokowi sebelum melaporkannya dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis pekan depan, bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Panitia yang bekerja sejak Mei lalu.

Masinton berharap Presiden Joko Widodo bisa mengkaji dan mempelajari temuan Pansus. "Agar semakin kokoh dan maju, serta negara mampu membangun sistem antikorupsi," kata Masinton, Senin lalu. Tak hanya itu, menurut dia, Panitia Angket juga berharap bisa bertemu dengan KPK.

KPK sejak awal menolak Panitia Angket. Mereka mengantongi saran dari ratusan pakar hukum tata negara yang menyatakan Panitia cacat hukum. Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan sempat meminta Jokowi bersikap tegas terhadap Panitia yang dinilai banyak kalangan hendak melemahkan, bahkan membubarkan, KPK. Belakangan, sejumlah pegawai KPK mengajukan gugatan uji materi atas pasal hak angket dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi.

Jokowi sebelumnya juga menolak permintaan KPK tersebut dengan dalih hak angket merupakan wewenang lembaga legislatif. Namun dia berulang kali menyatakan akan melindungi KPK dari pihak-pihak yang berniat melemahkan lembaga antirasuah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan juga menilai Panitia Angket tak perlu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. "Bila itu dilaksanakan, kasihan pemerintah," kata politikus Partai Amanat Nasional ini, Selasa lalu.